Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 7 No 6 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

DIGITALISASI NAGARI: Pengelolaan Website Pemerintahan Nagari Muaro Bodi

Miftahul Khair[1], Ummy Yatul Rahma[2], Laviony Bella Sukma[3], Agung[4], Ririn Febriani[5], Alisha Faihaa Najla Ende[6]
Universitas Negeri Padang
*e-mail: miftah@fmipa.unp.ac.id[1] ummyyatulrahma@gmail.com [2], agung002005@gmail.com[3], lavionnybella15@gmail.com[4] , ririnfebriani456@gmail.com[5], alishaende24@gmail.com[6]

Abstract

Digital transformation at the village or nagari government level is a crucial step in supporting transparency, public services, and community participation. The 2025 Community Service Program (KKN) of Padang State University (UNP), held in Muaro Bodi Village, Sijunjung Regency, raised the theme "Digitalization of Nagari," focusing on the management and optimization of the village government's official website. This study aims to describe the digitalization process carried out through the development of the nagari website, training local operators, and strategies for sustainable digital services. The method used was a participatory method through direct observation, interviews, and training. The results show that website management can improve access to public information, transparency of government activities, and open more effective communication channels between the nagari government and the community. This study recommends strengthening human resource capacity and regular content updates to maintain the effectiveness of digitalization at the nagari level.

Keywords: *digitalization of villages, government website, KKN UNP, Muaro Bodi, public services*

Abstrak

Transformasi digital pada tingkat pemerintahan desa atau nagari menjadi langkah penting dalam mendukung transparansi, pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP) 2025 yang dilaksanakan di Nagari Muaro Bodi, Kabupaten Sijunjung, mengangkat tema “Digitalisasi Nagari” dengan fokus pada pengelolaan dan optimalisasi website resmi pemerintahan nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses digitalisasi yang dilakukan melalui pengembangan website nagari, pelatihan operator lokal, serta strategi keberlanjutan layanan digital. Metode yang digunakan adalah metode partisipatoris melalui observasi, wawancara, dan pelatihan secara langsung. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan website mampu meningkatkan akses informasi publik, transparansi kegiatan pemerintahan, serta membuka jalur komunikasi yang lebih efektif antara pemerintahan nagari dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM dan pembaruan konten berkala untuk menjaga efektivitas digitalisasi di tingkat nagari.

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 234.KK.443
Prefix DOI :
10.9765/Krepa.V218.3784
Copyright : Author
Publish by : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 6 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Kata kunci: digitalisasi nagari, website pemerintahan, KKN UNP, Muaro Bodi, pelayanan publik	

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi di tingkat pemerintahan desa atau nagari merupakan bagian dari transformasi tata kelola yang lebih modern, transparan, dan partisipatif. Pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai program seperti Desa Digital dan Smart Village mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Kemendesa, 2023). Salah satu implementasi dari program ini adalah pengelolaan website resmi pemerintah desa atau nagari. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di abad ke-21 telah membawa transformasi besar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengelola informasi. Tidak terkecuali dalam bidang pemerintahan, kemajuan teknologi ini mendorong lahirnya konsep digitalisasi pemerintahan, yang dikenal dengan istilah *e-Government*. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi pemerintahan tidak hanya relevan di tingkat pusat atau provinsi, tetapi juga sangat penting untuk diterapkan pada level paling dasar pemerintahan, yakni nagari.

Nagari, sebagai bentuk pemerintahan adat dan administratif yang khas di Sumatera Barat, memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat. Sebagai lembaga yang berada paling dekat dengan warga, nagari menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik, menjalankan pembangunan, dan menjaga nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, digitalisasi nagari merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan nagari agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Permasalahan terkait perumahan dan permukiman kumuh tentu saja masih menjadi salah satu isu utama yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan, dan tuntutan sosialekonomi masyarakat yang terus mengalami peningkatan. Perumahan dan permukiman kumuh adalah kondisi dimana keberadaan tempat yang tidak layak huni disebabkan oleh pengelolaan tata ruang yang buruk dan kepadatan bangunan tinggi dalam luas yang terbatas, kualitas bangunanyangmasih rendah sehingga membahayakan keberlangsungan hidup.

penghuninya,kurangnya infrastruktur, serta rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan. (RPLP Program Kotaku, 2021).Sejak tahun 2016 pada era kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur dan penanganan permukiman kumuh disetiap wilayah di Indonesia dengan menetapkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan strategi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai unsur pelaksanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan sasaran dari Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dengan mendukung gerakan "Gerakan 100-0-100"(Kotaku.pu.go.id, 2022).

Salah satu implementasi nyata dari digitalisasi nagari adalah pengelolaan website resmi nagari. Website ini berfungsi sebagai media komunikasi, informasi, dan pelayanan yang menghubungkan pemerintah nagari dengan masyarakat. Website nagari dapat memuat berbagai konten, seperti profil nagari, struktur organisasi, program kerja, data kependudukan, laporan keuangan, berita kegiatan, serta layanan administrasi publik secara daring. Melalui website ini, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke kantor nagari.

Lebih dari itu, website nagari juga dapat menjadi sarana untuk membangun partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan menyediakan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, atau saran secara daring, pemerintah nagari dapat

memperkuat prinsip keterbukaan dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, keterbukaan informasi melalui website juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah nagari kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Salah satu implementasi nyata dari digitalisasi nagari adalah pengelolaan website resmi nagari. Website ini berfungsi sebagai media komunikasi, informasi, dan pelayanan yang menghubungkan pemerintah nagari dengan masyarakat. Website nagari dapat memuat berbagai konten, seperti profil nagari, struktur organisasi, program kerja, data kependudukan, laporan keuangan, berita kegiatan, serta layanan administrasi publik secara daring. Melalui website ini, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke kantor nagari. Lebih dari itu, website nagari juga dapat menjadi sarana untuk membangun partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan menyediakan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, atau saran secara daring, pemerintah nagari dapat memperkuat prinsip keterbukaan dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, keterbukaan informasi melalui website juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah nagari kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Meskipun potensinya besar, pengelolaan website nagari masih menghadapi sejumlah tantangan. Tidak semua nagari memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan teknologi informasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang belum merata, serta rendahnya literasi digital baik di kalangan perangkat nagari maupun masyarakat, menjadi hambatan tersendiri dalam optimalisasi website nagari. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memperkuat kapasitas nagari dalam mengelola website secara berkelanjutan.

Dalam kerangka itulah, kajian mengenai digitalisasi nagari melalui pengelolaan website menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana website nagari telah dimanfaatkan sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang baik, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan digitalisasi nagari ke depan. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi benar-benar menjadi alat pemberdayaan nagari dan masyarakat secara nyata.
Nagari Muaro Bodi, salah satu nagari di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, memiliki potensi besar dalam pengembangan layanan digital. Namun, pada awal pelaksanaan KKN, website resmi nagari belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media informasi dan pelayanan. Oleh karena itu, tim KKN UNP 2025 menetapkan program kerja utama bertema “Digitalisasi Nagari” yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan website pemerintahan nagari.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program digitalisasi, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode partisipatoris. Lokasi penelitian adalah Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Adapun tahapan metode meliputi:

1. Observasi Awal: Mengidentifikasi kondisi eksisting website nagari (domain, struktur menu, konten, dan aksesibilitas).

2. Wawancara: Dilakukan terhadap Wali Nagari, perangkat nagari, dan masyarakat untuk menggali harapan dan hambatan terhadap digitalisasi nagari.

3. Pelatihan dan Pendampingan: Tim KKN melakukan pelatihan kepada operator nagari mengenai pengelolaan konten website berbasis CMS, pengarsipan dokumen digital, dan etika publikasi daring.

4. Implementasi dan Evaluasi: Website dikelola selama masa KKN untuk melihat efektivitasnya dalam menyebarkan informasi publik dan merespons kebutuhan Masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap beberapa nagari yang telah mengembangkan sistem digital melalui website resmi. Fokus utama pembahasan ini adalah bagaimana proses pengelolaan website dijalankan, apa saja manfaat dan kendala yang dihadapi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi digitalisasi nagari secara berkelanjutan.

1. Implementasi Digitalisasi melalui Website Nagari

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar nagari yang menjadi objek kajian telah memiliki website resmi. Namun, tingkat pemanfaatan website tersebut sangat bervariasi. Beberapa nagari telah memanfaatkan website secara aktif sebagai media pelayanan dan informasi publik, sementara sebagian lainnya hanya menggunakannya sebagai formalitas tanpa pembaruan informasi secara berkala.

Website yang aktif umumnya menampilkan informasi dasar seperti:

1. Profil nagari dan perangkatnya
2. Agenda kegiatan dan dokumentasi program
3. Anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Nagari)
4. Informasi pelayanan publik (seperti pembuatan surat keterangan, domisili, dan rekomendasi usaha)
5. Data kependudukan, potensi UMKM, dan objek wisata lokal

Adanya website ini menjadi langkah awal yang signifikan menuju transformasi digital di tingkat nagari. Namun, belum semua nagari memahami pentingnya konten yang dinamis, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Peran Strategis Website dalam Pemerintahan Nagari

Berdasarkan wawancara dengan wali nagari, sekretaris nagari, dan operator IT nagari, diperoleh data bahwa website nagari memiliki berbagai fungsi strategis, antara lain:

a. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Melalui fitur publikasi dokumen resmi seperti APB Nagari, laporan realisasi anggaran, dan hasil musyawarah nagari (musnag), masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan serta penggunaan dana desa/nagari. Hal ini mendorong terbentuknya budaya transparansi dalam pemerintahan nagari.

b. Efisiensi Pelayanan Publik

Beberapa nagari telah mengembangkan layanan berbasis formulir online seperti pembuatan surat keterangan, surat pengantar, hingga permohonan bantuan sosial. Hal ini memangkas waktu layanan, mengurangi antrean, dan memungkinkan pelayanan yang lebih tertib dan terdokumentasi.

c. Media Informasi yang Cepat dan Luas

Dengan adanya website, informasi seperti kegiatan gotong royong, bantuan bencana, pendaftaran BLT, dan pengumuman lainnya dapat diakses masyarakat kapan saja. Website menjadi solusi informasi cepat terutama bagi masyarakat yang berada di luar daerah.

d. Promosi Potensi Nagari

Banyak nagari memiliki kekayaan lokal seperti wisata alam, kerajinan, produk UMKM, dan kuliner khas. Website menjadi etalase digital untuk memperkenalkan potensi nagari ke publik, termasuk calon investor dan wisatawan.

3. Kendala Pengelolaan Website Nagari

Walaupun potensinya besar, pengelolaan website nagari masih menghadapi sejumlah tantangan utama yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar nagari belum memiliki tenaga khusus yang menguasai bidang teknologi informasi. Operator website umumnya merangkap jabatan dan tidak memiliki latar belakang teknis. Akibatnya, pengelolaan website seringkali terbengkalai atau hanya diisi saat ada kegiatan besar.

Beberapa wawancara menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pihak ketiga (misalnya mahasiswa KKN atau penyedia jasa web) sangat tinggi, dan setelah mereka tidak lagi terlibat, website menjadi tidak aktif.

b. Infrastruktur Teknologi yang Belum Merata

Masalah keterbatasan jaringan internet masih menjadi kendala serius di beberapa nagari, terutama yang berada di daerah perbukitan atau pelosok. Kondisi ini membuat perangkat nagari kesulitan dalam memperbarui informasi secara daring, apalagi jika pengelolaan harus dilakukan dari kantor nagari yang akses sinyalnya terbatas.

c. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat

Meski website telah tersedia, tidak semua masyarakat mampu memanfaatkannya. Kelompok usia lanjut, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, serta warga yang tidak terbiasa menggunakan perangkat digital cenderung tetap mengandalkan cara-cara konvensional dalam mendapatkan informasi atau layanan.

Sebagian warga bahkan tidak mengetahui bahwa nagari mereka telah memiliki website resmi, yang menunjukkan bahwa masih kurangnya upaya sosialisasi dan edukasi dari pihak nagari.

d. Tidak Adanya Dukungan Anggaran Khusus

Sebagian besar website dibangun menggunakan dana hibah atau kerja sama non-permanen, bukan bagian dari perencanaan jangka panjang nagari. Minimnya alokasi anggaran khusus untuk operasional, pembaruan konten, dan pelatihan SDM menjadikan keberlanjutan website tidak terjamin.

4. Strategi Penguatan Pengelolaan Website Nagari

Agar digitalisasi melalui pengelolaan website dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, beberapa strategi dapat diterapkan berdasarkan hasil analisis data:

a. Pelatihan Rutin dan Peningkatan Kapasitas SDM

Pemerintah kabupaten/provinsi perlu menyediakan pelatihan berjenjang tentang pengelolaan website, manajemen konten, keamanan digital, dan layanan daring kepada perangkat nagari. Bisa juga melibatkan perguruan tinggi atau komunitas IT lokal dalam kegiatan pemberdayaan ini.

b. Pengembangan Sistem Manajemen Website yang Sederhana dan Ramah

Website nagari idealnya menggunakan sistem manajemen konten (CMS) yang mudah dipelajari, sehingga bisa dioperasikan oleh perangkat tanpa keahlian teknis tinggi. Hal ini akan menurunkan ketergantungan pada pihak luar dan meningkatkan keberlanjutan.

c. Integrasi dengan Sistem Informasi Kabupaten/Provinsi

Agar informasi lebih terpusat dan terdokumentasi dengan baik, website nagari dapat diintegrasikan dengan sistem pemerintahan daerah atau portal desa digital provinsi. Ini juga akan mempermudah monitoring dan evaluasi dari pihak pemerintah di atasnya.

d. Peningkatan Sosialisasi dan Literasi Digital Masyarakat

Perlu ada upaya untuk mengenalkan manfaat website kepada masyarakat melalui sosialisasi, banner informasi, pelatihan masyarakat, atau bahkan pengintegrasian layanan dengan aplikasi mobile yang lebih familiar.

e. Penganggaran Khusus untuk Digitalisasi Nagari

Digitalisasi tidak bisa berjalan tanpa dukungan anggaran yang jelas. Nagari perlu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKP dan APB Nagari) yang secara eksplisit mengalokasikan dana untuk operasional website, pelatihan SDM, dan pengadaan peralatan teknologi.

6. KESIMPULAN

Digitalisasi nagari merupakan sebuah terobosan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang lebih terbuka, responsif, dan partisipatif. Salah satu bentuk implementasi digitalisasi yang paling menonjol adalah pengelolaan website nagari. Website nagari berfungsi sebagai wadah komunikasi dua arah antara pemerintah nagari dan masyarakat, serta menjadi media informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya website, informasi tentang program kerja, kegiatan pembangunan, pengumuman resmi, laporan keuangan, serta pelayanan administrasi nagari dapat disampaikan secara transparan dan terstruktur. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari, tetapi juga mendorong keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Selain sebagai media informasi, website nagari juga memiliki fungsi strategis sebagai alat promosi potensi lokal. Melalui tampilan digital yang menarik dan konten yang informatif, nagari dapat memperkenalkan kekayaan budaya, destinasi wisata, produk UMKM, dan keunggulan lokal lainnya kepada publik secara lebih luas, bahkan hingga ke tingkat nasional dan internasional. Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta memperluas jaringan kerja sama antarwilayah.

Namun demikian, implementasi digitalisasi nagari melalui website juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah terpencil yang masih memiliki akses internet yang minim. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan konten dan pemeliharaan teknis website juga menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Dibutuhkan pelatihan yang berkelanjutan bagi perangkat nagari, serta pendampingan dari pihak terkait seperti Dinas Kominfo, perguruan tinggi, atau mitra swasta untuk memastikan kualitas dan kesinambungan pengelolaan website.

Dari keseluruhan proses ini, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi nagari melalui pengelolaan website bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan zaman yang mendesak untuk diwujudkan. Jika direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, digitalisasi ini mampu menjadi katalisator perubahan menuju pemerintahan nagari yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan demi mendukung keberhasilan transformasi digital yang berkelanjutan di tingkat nagari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. hlm. 1-119.

Ardiansyah, R. (2022). “Implementasi Website Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Digital.” Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(2), 145–155.

bdal. 2015. Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. hlm. 1-198.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Hasbi, Imanuddin, dkk. 2021. Kebijakan Publik. Bandung: Widina Bhakti Persada. hlm. 1-250.

Kadji, Yulianto. 2015. FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas). Kota Gorontalo: UNG Press Gorontalo. hlm. 1-150.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). Panduan Desa Digital.Jakarta: Kemendesa PDTT.

Pasolong, Harbani. 2019. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. hlm. 1-282.

Pramono, Joko. 2020. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press. hlm. 1-144.

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Aipi Bandung-Puslit KP2W Lemlit Undap. hlm.1-235.

Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta. hlm. 1-154.

Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers). Hlm. 2-152.